

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 322 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN, SERTIFIKASI PENYULUHAN,
DAN LAIK SEHAT

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sertifikasi Penyuluhan, dan Laik Sehat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sertifikasi Penyuluhan, dan Laik Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-289/MK.7/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sertifikasi Penyuluhan, dan Laik Sehat, dengan alasan bahwa :

1. Retribusi Izin dikenakan sekali setiap Penerbitan Izin.
2. Izin/Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional dan Panti Pijat Tradisional berlaku selama melakukan kegiatannya sesuai Pasal 8 Keputusan menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
3. Izin Tukang Gigi berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali, sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/-PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.
4. Penerbitan Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga harus disertai dengan Sertifikat Laik Sehat Jasa Boga yang berlaku selama 3 tahun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan 715/Menkes/SK//2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.
5. Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbaharui, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

KEDUA : Agar Walikota Blitar menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sertifikasi Penyuluhan, dan Laik Sehat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 8. Gubernur Jawa Timur;
- Ketua DPRD Kota Blitar.